

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATPOL PP
DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFĪZIYYAH***

SKRIPSI

Oleh

Feti Fatmawati

NIM. 05020421040



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feti Fatmawati
NIM : 05020421040
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Penegakan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun
2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satpol
PP Dalam Perspektif *Siyāsah Tanfidziyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



feti fatmawati
NIM. 05020421040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

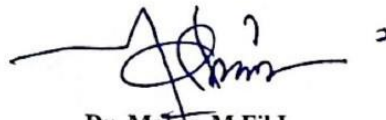
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Feti Fatmawati
NIM : 05020421040
Judul : Penegakan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap
Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Dalam
Perspektif Siyasaah Tanfidziyah

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 8 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Mahir, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

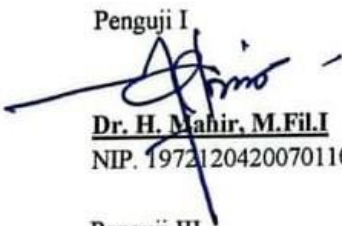
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Feti Fatmawati
NIM. : 05020421040
Judul : Penegakan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap
Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Dalam
Perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*

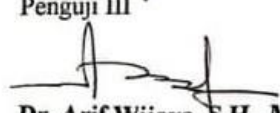
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

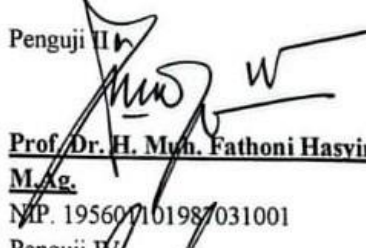
Penguji I


Dr. H. Mahir, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027

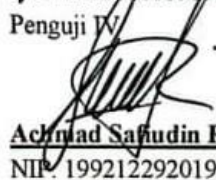
Penguji III


Dr. Arif Wijaya, S.H., M. Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II


Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim,
M.Ag.
NIP. 195607101987031001

Penguji IV


Achmad Safudin R, M.H.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 26 Mei 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. H. Saifuddin Musafahah, M.Ag.
NIP. 19630321999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Feti Fatmawati
NIM : 05020421040
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : fatmawatifeti5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP Dalam Perspektif

Siyasah Tanfizziyah.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Oktober 2025

Penulis

(Feti Fatmawati)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*”. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP dan *kedua*, bagaimana perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah* terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan perda yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri serta bagaimana analisis penegakan tersebut jika ditinjau dari perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*, yakni suatu pendekatan dalam fiqh siyasah yang menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan oleh penguasa guna mencegah kemungkaran dan menegakkan kemaslahatan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara langsung dengan pihak Satpol PP, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, upaya penegakan perda oleh Satpol PP telah dilakukan secara rutin, baik melalui sosialisasi, operasi penertiban, maupun pemberian sanksi administratif. Namun, efektivitas penegakan tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai retribusi perizinan minuman beralkohol, keterbatasan jumlah PPNS, minimnya sarana dan prasarana operasional, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. *Kedua*, Dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*, tindakan Satpol PP ini telah sesuai dengan prinsip *wilāyatul hisbah* dalam Islam, yakni melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar melalui mekanisme penegakan hukum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, pemerintah kabupaten kediri diharapkan mengeluarkan perda terkait retribusi perizinan peredaran minuman beralkohol agar dapat menimalisir peredaran minuman beralkohol. *Kedua*, Satpol PP sebagai aparat penegak hukum harus selalu memastikan operasi penertiban serta upaya pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya peredaran minuman beralkohol tetap ditekankan agar *amar ma’ruf nahi munkar* tetap terjaga.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penulisan	8
E. Manfaat Penulisan	8
F. Kajian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN KONSEP <i>SIYĀSAH</i>	
<i>TANFĪZIYYAH</i>	19
A. Teori Penegakan Hukum	19
B. Tinjauan Umum Terkait Aturan Peredaran Minuman Beralkohol	25
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol	25
2. Peraturan daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum	32

C. <i>Konsep Siyāsah Tanfīziyyah</i>	34
D. <i>Wilāyat Al-Hisbah</i>	36
1. Pengertian <i>Wilāyat Al-Hisbah</i>	36
2. Peran <i>Wilāyat Al-Hisbah</i>	40
BAB III PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KEDIRI BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Kondisi Geografis Kabupaten Kediri.....	43
2. Kondisi Demografis Kabupaten Kediri.....	46
B. Profil Satpol PP	51
1. Tugas Pokok Satpol PP	51
2. Visi dan Misi Satpol PP	59
C. Upaya Penegakan Peraturan Daerah Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satpol PP	60
D. Rekapitulasi data peredaran minuman beralkohol	71
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN PERDA KABUPATEN KEDIRI DALAM PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL	79
A. Penegakan Perda Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Peredaran Minuman Beralkohol... 79	
B. Tinjauan <i>Siyāsah Tanfīziyyah</i> Dalam Penegakan Perda Kabupaten Kediri No.6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol	88
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kediri	2
Tabel 2. Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	43
Tabel 3. Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2024	46
Tabel 4. Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Kediri Tahun 2024	48
Tabel 5. Komposisi Penduduk Kabupaten Kediri Berdasarkan Usia Tahun 2024	50
Tabel 6. Mayoritas Pemeluk Agama Kabupaten Kediri Tahun 2024	51
Tabel 7. Data Jumlah Personal/Anggota Satpol PP PNS Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	69
Tabel 8. Data Jumlah Personel/Anggota Satpol PP Non PNS Kabupaten Kediri Tahun 2024	69
Tabel 9. Data Jumlah Kendaraan Operasional Satpol PP Kabupaten Kediri Tahun 2024.....	70
Tabel 10. Data Jumlah Tersangka Pengedar Minuman Beralkohol Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024	72
Tabel 11. Data Jumlah Barang Bukti Minuman Beralkohol Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024	73
Tabel 12. Tempat Peredaran Minuman Beralkohol Kabupaten Kediri.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Kediri	45
Gambar 2. Struktur Organisasi Satpol PP	53
Gambar 3. Presentase Peredaran Minuman Beralkohol Kabupaten Kediri	74

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Māwardi. (1995). *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Ibnu Taimiyah. (1992). *Al-Ḥisbah fī al-Islām*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Sanusi Ahmad. (2001). *Pengantar Siyasah Syar’iyyah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2007). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 56–60. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal/Skripsi

- Burhan Ashshofa. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dellyana Shant. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Candra Priangguna. (2015). “Perilaku Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya.” *Jurnal BK Unesa* .
- E Ersan. (2010). “Peran Wilayah Al-Hisbah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Uinsby.Ac.Id*.
- Fahmi Suhabrin Lubis. (2024). Penerapan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqh Siyasah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fanni Ardianto. “Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah (Studi di Kampung Sendang

- Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah).” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2024.
- Harris Y P Sibuea. (2016). “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol.” *Negara Hukum*.
- Hilman Hadi Kusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju: bandung.
- Hutapea, Janter Ebil, Zulkarnain Noerdin, Robert Libra. (2023). “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Yang Tidak Memiliki Izin Di Kecamatan Senapelan.” *Semnashum: Seminar Nasional Hukum*.
- Ilham Dwi Maryadi. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Marah Halim. (2011). “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura*.
- Marya Andriyana. (2022). “Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Fiqh Siyasah.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Mita Wirnawati. (2020). “Kinerja Satpol PP Dalam Pengendalian Pedagang Kaki Lima Di Kota Cilegon.” *Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*.
- Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Riswan. (2019). “Potret Wilayahul Hisbah Di Kabupaten Simuelue.” *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Rizky Fajar Solin. (2018). “Efektivitas Kinerja Wilayahul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam).” *Universitas Islam Negeri Sumatetra Utara Medan*.

- Safri Miradj. (2020) .Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat). Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama.
- Sayuti. (2024). “Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al Mawardi.” *Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif*.
- Silvani Nurhaliza. (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Sektor Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Wahyudi. (2019). “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo.” *Institut Agama Islam Negeri Palopo*.
- Yitawati, K., Chairani, M. A., Sukarjono, B., & Aprillino, A. (2024). Peran dan Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Yusuf Abraham. (2022). “Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Kabupaten Kediri (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri).” *Universitas Islam Kadiri*.

Website

Badan Pusat Statistika Kabupaten Kediri dalam Angka 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP.
- Peraturan Bupati Kediri No. 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Pembelian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ibnu selaku anggota PPUD Satpol PP Kabupaten Kediri Pada 7 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Riswadi selaku kasi PPUD Satpol PP Kabupaten Kediri Pada 7 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Yulianto selaku anggota PPUD Satpol PP Kabupaten Kediri Pada 7 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Yunarko selaku anggota PPUD Satpol PP Kabupaten Kediri Pada 7 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Yusuf selaku ketua bidang PPUD Satpol PP Kabupaten Kediri Pada 7 Desember 2024.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A